

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang meliputi :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKPP dan setiap Unit Organisasi di Lingkungan LKPP dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



SHAHANDRA HANITIYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Ber kala	Serta Merta	Setiap Saat							
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
A	Tahap Perencanaan			√	Rencana Umum Pengadaan (RUP).	PA/KPA dan PPK pada setiap Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan; LKPP	Softcopy melalui: website sirup.lkpp.go.id	Sesuai dengan retensi arsip	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	RUP terbuka melalui sirup.lkpp.go.id, data dapat di <i>export</i> dalam bentuk Ms.Excel dan diunduh oleh pemilik data

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
										Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
B	Tahap Pemilihan				Terdiri dari:						
				√	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	PPK pada masing-masing Unit Organisasi dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Tahun Anggaran Berjalan; LKPP	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021	Terbuka setelah proses pemilihan selesai
			√	2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Softcopy melalui website: lpse.lkpp.go.id			Sesuai dengan retensi arsip	Terbuka		
			√	3. Spesifikasi Teknis;	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)			Sesuai dengan retensi arsip	Terbuka setelah proses pemilihan selesai		
			√	4. Rancangan Kontrak;	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)			Sesuai dengan retensi arsip	Terbuka setelah proses pemilihan selesai		
				√	5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	Terbuka		
				√	6. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	Terbuka setelah proses pemilihan selesai		

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
				√	7. Daftar Kuantitas dan Harga;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Softcopy</i> melalui website: <a href="http://sirup.lkpp.go.id">sirup.lkpp.go.id</a> dan <a href="http://lpse.lkpp.go.id">lpse.lkpp.go.id</a>	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
				√	9. Gambar Rancangan Pekerjaan;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	11. Dokumen Penawaran Administratif;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	12. Surat Penawaran Penyedia;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
				√	13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	16. Jawaban Sanggah;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	17. Jawaban Sanggah Banding;	PA/KPA		Softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	18. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai
				√	19. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
				√	20. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka
				√	21. Surat Perjanjian Kemitraan;	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pemilihan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	22. Surat Perjanjian Swakelola;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	23. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;	PA/KPA atau PPK pada masing-masing Unit Organisasi		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka
				√	24. Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> ;	PA/KPA		<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
C	Tahap Pelaksanaan				Terdiri dari:						
				√	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;	PPK pada masing-masing Unit Organisasi	Tahun Anggaran Berjalan; LKPP	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbuka setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.			Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	2. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Terbuka setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
		√	3. Surat Perintah Mulai Kerja;	Hardcopy, softcopy (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip			3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I	Terbuka		

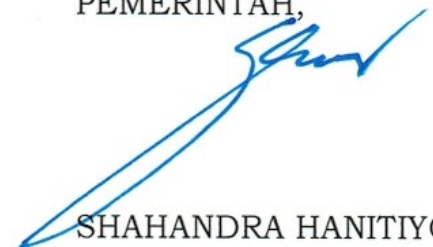
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
				√	4. Surat Jaminan Pelaksanaan;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip	Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Terbuka setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	5. Surat Jaminan Uang Muka;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		
				√	6. Surat Jaminan Pemeliharaan;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		
				√	7. Surat Pesanan E-Purchasing;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		
				√	8. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		
				√	9. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Acuan/Dasar Hukum Penetapan	Keterangan
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat							
				√	10. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		Terbuka setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dan tidak mengandung informasi yang dikecualikan
				√	11. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> ;			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		
				√	12. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>			<i>Hardcopy, softcopy</i> (hanya dapat dilihat)	Sesuai dengan retensi arsip		

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
 SHAHANDRA HANITIYO